



## PENYIAPAN SATGAS TNI DALAM MISI PERDAMAIAN SEBAGAI IMPLEMENTASI UU NO. 34/2004



## DAFTAR ISI

### BAB I. PENDAHULUAN

1. Umum .....	1
2. Maksud dan Tujuan.....	2
3. Ruang Lingkup dan Tata Urut. ....	3
4. Metode dan Pendekatan .....	3
5. Pengertian .....	3

### BAB II LATAR BELAKANG PEMIKIRAN

6. Umum.....	4
7. Landasan Hukum.....	4
8. Landasan Operasional .....	5
9. Landasan Teori .....	6
10. Dasar Pemikiran .....	7

### BAB III DATA DAN FAKTA

11. Umum. ....	8
12. Rekrutmen personel penjaga perdamaian.....	9
13. Kesiapan Alutsista dan Alkap dalam Pelaksanaan Tugas.....	12
14. Periodisasi Latihan dan Pembekalan .....	14

### BAB IV ANALISA

15. Umum. ....	28
16. Rekrutmen personel .....	28
17. Materi .....	29
18. Sarana Prasarana .....	31
19. Periodisasi Latihan dan Pembekalan .....	34

### BAB V PENUTUP

20. Kesimpulan .....	35
21. Rekomendasi .....	35

### DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran-1	Alur Pikir
2. Lampiran-2	Daftar Pustaka
3. Lampiran-3	Daftar Pokja



## PENYIAPAN SATGAS TNI DALAM MISI PERDAMAIAN SEBAGAI IMPLEMENTASI UU NO. 34/2004

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1. Umum.

a. Pasca Perang dunia II, timbul berbagai penderitaan dan rusaknya harta benda serta jatuhnya korban jiwa. Bangsa-bangsa di dunia tidak ingin hal tersebut terulang kembali. Mereka sepakat untuk bekerjasama dalam menjaga perdamaian dunia maupun menyelesaikan persoalan-persoalan yang dapat memicu perang melalui pembentukan sebuah badan internasional yang akan membantu umat manusia untuk hidup bebas dari ketakutan dan penderitaan. Pada tanggal 24 Oktober 1945 didirikanlah organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan sampai sekarang tanggal tersebut diperingati sebagai hari PBB. Tujuan pembentukan PBB adalah untuk menggalang kerjasama antar bangsa dan negara dalam memelihara perdamaian, keamanan, mengembangkan persahabatan antar bangsa di dunia, membantu bangsa-bangsa mengurangi ketegangan, mencegah konflik dan menghentikan perpeperangan.

b. *Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam acara sambutan kunjungan dari Sekjen PBB Ban Ki Moon di IPSC, Sentul beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa "Melalui pasukan perdamaian,*



*Indonesia memainkan peranan aktif dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia". Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia saat ini berperan penting dalam menjaga perdamaian dunia dengan mengirimkan pasukan perdamaian di bawah bendera PBB. Keberhasilan misi perdamaian dapat dilihat dari kondisi negara yang tengah dilanda konflik, apabila konflik di negara tersebut sudah berkurang atau tidak ada kehadiran misi Perdamaian bisa membawa kearah yang lebih baik.*

c. Dilihat dari perkembangan jumlah pasukan perdamaian Indonesia di PBB, terdapat peningkatan yang cukup signifikan yaitu keterlibatan Indonesia setelah akhir tahun 2006, pengiriman pasukan misi perdamaian dunia ke UNIFIL, Lebanon. Pra-pengiriman



Pasukan Indonesia ke UNIFIL (sebelum tahun 2006), total personel Indonesia hanya pada level 300-an *peacekeepers* (posisi 44 dunia). Hingga akhir bulan April 2011.<sup>1</sup> Indonesia terus membuktikan komitmennya dalam pemeliharaan perdamaian dunia antara lain melalui pengiriman personel pada berbagai Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB (*Peacekeeping Operations/PKO*) dimana partisipasi Indonesia dalam PKO yang terdiri dari komponen militer, polisi dan sipil adalah sebesar 1.801 personel atau berada pada peringkat 16 terbesar pengirim pasukan perdamaian PBB (T/PCCs-*Troop/Police Contributing Countries*). Keberhasilan Kontingen Indonesia dalam setiap penugasan sebagai pasukan perdamaian dunia sangat ditentukan oleh kualitas kemampuan prajurit berstandar internasional. Dengan berbekal kemampuan prajurit profesional berstandar internasional itu diharapkan tugas-tugas yang diemban dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Fakta-fakta yang diperoleh dari beberapa kali penugasan menunjukkan bahwa masih terdapatnya berbagai kelemahan yang ditinjau dari segi kemampuan prajurit secara individual dalam pelaksanaan tugas sebagai seorang penjaga perdamaian<sup>2</sup>. Kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam penugasan selama ini diantaranya adalah

seperti keterbatasan kemampuan berbahasa Inggris, keterbatasan penguasaan kemampuan teknologi, kemampuan mengemudi setir kiri, kemampuan penggunaan prosedur komunikasi secara benar, kurangnya pengetahuan tentang etika dan tata krama hubungan internasional dan pengetahuan tentang taktik, serta prosedur penugasan.

d. Untuk merespon permasalahan tersebut di atas, Seskoad sebagai lembaga pengkajian strategis TNI AD memandang perlu membuat kajian tentang penyiapan Satgas TNI dalam Misi Perdamaian sebagai Implementasi UU No. 34/2004 guna meningkatkan kualitas kemampuan prajurit, terutama prajurit-prajurit yang tergabung dalam batalyon Satgas TNI yang memenuhi standar penugasan misi perdamaian dunia dengan meng-optimalkan latihan diluar program sehingga terlahir Satgas TNI yang berkualitas di mata dunia.

## 2. Maksud dan tujuan.

a. Maksud. Memberi gambaran tentang penyiapan Satgas TNI guna mendukung pelaksanaan tugas dalam misi perdamaian sebagai Implementasi UU No. 34/2004.

b. Tujuan. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Pimpinan TNI AD guna menentukan kebijakan dan kebijaksanaan yang tepat agar tercipta Satgas TNI yang mampu menjalankan tugas misi perdamaian yang handal dan disegani oleh pasukan perdamaian dari negara lain di bawah bendera PBB pada masa yang akan datang.

<sup>1</sup> Kemlu RI, Partisipasi Indonesia dalam Pasukan Misi Perdamaian PBB, dapat diakses di <http://www.kemlu.go.id/Pages/IIssueDisplay.aspx?IDP=10&l=id>.

<sup>2</sup> Temuan-temuan ini di dapat dari hasil pengamatan penugasan Batalyon Mekanis Kontingen Garuda di Unifil, Lebanon



### 3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.

- a. Ruang lingkup kajian ini dibatasi pada optimalisasi latihan diluar program bagi prajurit yang tergabung dalam Satgas TNI, khususnya yang berkaitan dengan penguasaan pengetahuan, keterampilan dan kesiapan penugasan Perdamaian Dunia.
- b. Pembahasan kajian Penyiapan Satgas TNI dalam Misi Perdamaian sebagai Implementasi UU No.34/2004 ini disusun dengan tata urut sebagai berikut :

- 1) Pendahuluan.
- 2) Latar belakang pemikiran.
- 3) Data dan Fakta
- 4) Analisa
- 5) Penutup.

### 4. Metode dan Pendekatan.

- a. Metode. Metode yang digunakan dalam penulisan kajian ini adalah deskriptif analisis yaitu dengan menganalisa semua data dan fakta yang ada dihadapkan pada penyiapan Satgas TNI dalam misi perdamaian sebagai Implementasi UU No. 34/2004.

- b. Pendekatan. Menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kepustakaan.

### 5. Pengertian.

- a. *Peace Keeping Operation (PKO)* adalah operasi pemeliharaan perdamaian yang dilaksanakan oleh PBB di suatu negara atau kawasan tertentu yang sedang dalam sengketa guna memelihara dan menjaga perdamaian dalam rangka menciptakan kondisi ke arah penyelesaian konflik serta telah ditetapkan melalui suatu mandat resolusi DK PBB.<sup>3</sup>

b. *Indonesia Peace and Security Center (IPSC)* merupakan institusi yang didedikasikan untuk meningkatkan kapasitas dalam operasi perdamaian dunia, mencakup terorisme dan manajemen penanggulangan bencana alam. Lembaga ini yang akan menyiapkan dan melatih para prajurit Indonesia yang akan ditugaskan dalam misi perdamaian dunia. Melalui lembaga ini diharapkan dapat mewujudkan cita-cita Indonesia untuk menjadi salah satu dari 10 negara teratas yang turut berkontribusi dalam perdamaian dunia.<sup>4</sup>

c. *Military Observer (Milobs)* adalah tugas militer PBB yang bertugas memantau secara langsung di lapangan tentang kegiatan dari pihak-pihak yang bertikai atau bersengketa melalui kegiatan pengawasan, pencatatan, pelaporan, patroli, investigasi dan pendekatan terhadap tokoh yang berpengaruh.

d. *Department Peace Keeping Operation (DPKO)* adalah salah satu departemen di bawah Sekretaris Jenderal PBB yang menangani operasional pasukan perdamaian.

e. *Interstate conflict* merupakan konflik antar negara yang memiliki perbedaan kepentingan, atau konflik yang terjadi antara dua negara atau lebih yang memiliki perbedaan tujuan negara dan berupaya memaksakan kehendak negaranya kepada negara lain.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Huala Adolf SH.LLM. PhD, Bab 5, pasal 3, hlm 96

<sup>4</sup> Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyambut Sekjen PBB Ban Ki-Moon di IPSC, Sentul, 20 Maret 2012.

<sup>5</sup> Ho-Won Jeong, 2008, Understanding Conflict and Conflict Analysis, London: Sage, hlm. 5



## BAB II

### LATAR BELAKANG PEMIKIRAN

6. Umum. Dalam usia yang ke-68 tahun, Indonesia telah beberapa kali mengirimkan kontingen Satgas TNI keluar negeri untuk menjaga dan memelihara perdamaian dunia. Pada tahun 1957 untuk pertama kalinya, Indonesia mengirimkan pasukan atas permintaan PBB dalam rangka mengatasi kemerdekaan di Mesir. Penyelesaian konflik Internasional yang terjadi antara pihak-pihak yang bertikai merupakan tanggung jawab bersama Negara-negara dunia untuk menjaga perdamaian dunia di bawah bendera PBB. Indonesia sebagai salah satu anggota PBB perlu merefleksikan fungsi dan peranannya di dunia internasional melalui keterlibatannya dalam setiap misi PBB, dimana PBB sebagai organisasi terbesar dunia dalam menjaga perdamaian dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Dari beberapa kali pengiriman satuan tugas Kontingen Garuda dalam misi PBB, beberapa batalyon infanteri jajaran Kostrad telah diminta untuk berkontribusi menjadi unsur utama dalam Batalyon Mekanis Kontingen Garuda antara lain: Satuan jajaran Brigif Linud 17/1/ Kostrad, Satuan jajaran Brigif Linud 18/2/ Kostrad, dan Brigif Linud 3/1/Kostrad.

Melihat proyeksi penugasan ke depan dan keinginan Pemerintah RI untuk berperan secara aktif dalam percaturan dunia internasional tersebut, maka TNI AD secara umum akan banyak diminta untuk mengirimkan personelnya dalam rangka melaksanakan tugas internasional dibawah payung PBB. Dalam kurun waktu 2005-2012 menunjukkan



peningkatan pengiriman jumlah pasukan perdamaian di berbagai daerah konflik di dunia di bawah bendera PBB. Dasar pemikiran ini yang melatar belakangi perlunya peningkatan profesionalisme dan kualitas personel dalam tugas-tugas misi perdamaian dunia melalui pengoptimisasian penggunaan waktu latihan di luar program di satuan sehingga batalyon infanteri jajaran Kostrad sebagai unsur utama dalam satuan tugas Kontingen Garuda memiliki kemampuan yang dibutuhkan dan sesuai dengan tantangan tugas pada misi internasional, guna mewujudkan eksistensi positif Indonesia di dunia internasional.

#### 7. Landasan Hukum

a. Landasan Idiil. Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia memberikan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup dapat dicapai jika didasarkan atas keselarasan, keseimbangan dan keserasian seperti yang termaktup dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Indonesia senantiasa akan ikut memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun keikutsertaan kita secara aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa dan permasalahan dunia



yang akan membahayakan nilai-nilai kemanusiaan dimana setiap manusia memiliki hak asasi yang harus dihormati dan dihargai.

b. **Landasan Konstitusional.** Partisipasi Indonesia di dalam pasukan pemeliharaan perdamaian PBB (*Peace Keeping Operation*) didasari atas semangat pembukaan UUD 1945, khususnya alinea IV, tentang komitmen Indonesia untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

c. **Doktrin Tridek.** Doktrin TNI yang merupakan pedoman TNI dalam melaksanakan perannya berdasarkan



kepada pengalaman sejarah, nilai-nilai intrinsik perjuangan bangsa dan dengan dukungan mulai dari teori yang bersifat konsepsional sampai dengan yang bersifat operasional implementatif. Sebagai pedoman Doktrin

TNI diperlukan untuk melandasi pola pikir, pola sikap dan pola tindak dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI untuk mempertahankan NKRI yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara kesatuan RI Tahun 1945 dari berbagai ancaman militer dan non militer terhadap kedaulatan negara dan keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa.

## 8. Landasan Operasional.

a. Kebijakan politik luar negeri Indonesia, khususnya dalam hal upaya Indonesia untuk turut berperan aktif menjaga keamanan dan perdamaian internasional. Indonesia memiliki pandangan bahwa keberhasilan dari suatu misi perdamaian sangat tergantung kepada prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh seluruh anggota PBB, yaitu : persetujuan dari pihak-pihak yang bertikai (*consent*), memiliki mandat yang jelas, impartiality, dan *non-use of force* kecuali untuk membela diri dan mempertahankan mandat yang diemban oleh PBB. Kehadiran misi perdamaian seharusnya dapat mencegah terjadinya kembali konflik.b. Seiring dengan meningkatnya kepercayaan PBB terhadap Kontingen Garuda dalam operasi pemeliharaan perdamaian, perundang-undangan nasional telah mengakomodasi operasi pemeliharaan sebagai salah satu tugas pokok TNI sebagai salah satu bentuk dalam operasi militer selain perang. Secara eksplisit, hal tersebut tertuang dalam UU no. 34 tahun 2004 tentang TNI. Untuk itu, penggunaan kekuatan TNI dalam rangka tugas perdamaian dunia dilakukan sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia dan ketentuan hukum nasional. Indonesia, UU No 34 Tahun 2004, pasal 7 ayat (2) dan pasal 20 ayat (3).

c. TAP MPR RI Nomor VII /MPR/2000. Tentang peran TNI dan Polri, Pasal 4 Tugas Bantuan Tentara Nasional Indonesia, ayat (3). Tugas Bantuan Tentara Nasional Indonesia dalam perannya sebagai system



pertahanan adalah membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia (*Peacekeeping operation*) dibawah bendera Perserikatan Bangsa-bangsa.

d. Buku Putih Pertahanan "Mempertahankan tanah air memasuki abad 21". Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam rangka menjalin hubungan dengan negara-negara lain baik secara bilateral, regional maupun global secara internasional, dalam kerangka tersebut, sektor pertahanan Indonesia akan senantiasa menyumbang pemikiran strategis dalam memecahkan isu keamanan, maupun melalui keterlibatan secara fisik dibawah bendera PBB. Sedangkan keterlibatan sektor pertahanan diluar PBB dilaksanakan sejauh tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan prinsip-prinsip bangsa indonesia.



e. Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2002. "Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan Negara untuk ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian

regional dan internasional". UU Nomor 3 tahun 2002 memberikan kesempatan yang besar kepada TNI melaksanakan tugas pemeliharaan regional dan internasional. Dengan ikut aktif dalam mengirimkan pasukan perdamaian di bawah bendera PBB, TNI menjalankan apa yang telah tercantum dalam Undang-Undang tersebut.

f. Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004. Tugas pokok TNI sesuai UU RI Nomor 34 tahun 2004 adalah menegakkan kedaulatan negara mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tugas pokok dilaksanakan dengan pola operasi militer untuk perang (OMP) dan pola operasi militer selain perang (OMSP).

g. Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi. Tugas dalam rangka operasi perdamaian dunia dilaksanakan sesuai dengan kebijakan politik luar negeri indonesia dan mandat dari PBB atau organisasi internasional lain yang diakui oleh pemerintah dan sesuai dengan keputusan politik pemerintah.

## 9. Landasan Teori.

a. Teori Konflik. Konflik antar bangsa (*inter-state conflict*) merupakan suatu bentuk fenomena yang mengindikasikan adanya persaingan yang dapat memicu timbulnya konflik kepentingan antar Negara, kelompok Negara atau konspirasi lintas kawasan yang tidak selalu diselesaikan secara damai, sedangkan pemicu konflik di dalam negeri (*intra-state conflict*), pada umumnya adalah perbedaan sistem nilai sosial budaya, benturan



kepentingan ekonomi antar daerah atau daerah dengan pusat. Fenomena tersebut merupakan ancaman dalam mewujudkan perdamaian dunia.

b. Teori Hak Asasi Manusia. Setiap Negara anggota perserikatan bangsa-bangsa (PBB) mengemban tugas dan tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang HAM dan instrumen-instrumen HAM lainnya yang dikeluarkan oleh PBB. Ciri sebagai Tentara Profesional diantaranya adalah memantau kebijakan politik Negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diaktfifikasi.

10. Dasar Pemikiran. Dalam berbagai tugas misi perdamaian dunia, secara umum Satgas TNI telah mampu melaksanakan tugas tersebut dengan penuh kehormatan dan hasilnya

mendapat penilaian yang positif oleh dunia internasional. Namun dalam kenyataannya di lapangan masih banyak ditemukan kendala akibat belum maksimalnya penguasaan materi oleh prajurit yang bertugas. Beberapa hal yang menyebabkan keterbatasan bagi prajurit yang tergabung dalam Satgas TNI selama pelaksanaan tugas dan yang perlu untuk diperbaiki dan ditingkatkan secara profesional antara lain : Kemampuan berbahasa Inggris, penguasaan kemampuan teknologi, kemampuan mengemudi setir kiri, kemampuan penggunaan prosedur komunikasi secara benar, rendahnya pengetahuan tentang etika dan tata krama hubungan internasional antara anggota militer secara universal serta pengetahuan tentang tugas itu sendiri. Kesiapan prajurit itu sendiri perlu penyiapan secara tepat yang meliputi kesiapan mental, fisik dan akademik, serta kemampuan dalam menjaga hubungan kerja dalam lingkup dunia Internasional.





### BAB III

### DATA DAN FAKTA

11. Umum. Hingga akhir tahun 2012, Indonesia menduduki peringkat 16 dari 117 negara dalam daftar kontributor OPP PBB dengan 1.902 personel.<sup>6</sup> Kontribusi tersebut, terdiri dari 161 polisi, 25 *military observers*, dan 1.698 personel militer di 8 misi yaitu UNIFIL (1354, Lebanon), UNMISS (14, Sudan Selatan), UNISFA (1, Abyei Sudan), UNAMID (151, Darfur), MONUSCO (192, DRC), UNMIL (1, Liberia), MINUSTAH (178, Haiti), UNSMIS (11 Personel, Suriah). Peningkatan kontribusi pasukan Indonesia tidak hanya terlihat dalam jumlah personel, namun juga penambahan *performance unit*. Indonesia telah mengirimkan korvetnya, KRI Hasannudin, untuk bergabung dalam *Maritime Task Force* (MTF) UNIFIL. Ini adalah kali keempat partisipasi dalam MTF setelah KRI Diponegoro (April 2009), KRI Kaisiepo (Agustus 2010), dan KRI Sultan Iskandar Muda (September 2011). Indonesia juga telah memiliki visi untuk lebih mengembangkan peran dan partisipasinya di dalam *Peacekeeping Operations* (PKO)/Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP), khususnya meningkatkan peran ketiga komponen/unsur PKO yaitu; militer, polisi dan sipil. Untuk komponen militer, *leading sector* pengembangan telah dilakukan oleh Mabes TNI c.q. Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP).

Pada tanggal 20 Maret 2012, Sekjen PBB telah mengunjungi IPSC didampingi oleh *Undersecretary General for DPKO*, Mr Herve

Ladsus. Dalam paparannya yang bertema *“United Nations Peacekeeping: Challenges for Indonesia, the Region and Beyond”*, Sekjen PBB antara lain menyampaikan: i) penghargaan atas pembangunan IPSC yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara luas; ii) penghargaan atas kontribusi Indonesia dalam berbagai misi perdamaian PBB sekaligus menjadi contoh nyata keberhasilan pasukan perdamaian dalam memenangkan hati dan pikiran para penduduk di wilayah tugas; dan iii) mengharapkan peningkatan partisipasi RI baik dalam bentuk personel maupun peralatan.

*Indonesian Peace and Security Centre* (IPSC) di Sentul diresmikan oleh Presiden RI pada tanggal 19 Desember 2011 guna meningkatkan kesiapan Indonesia untuk berpartisipasi dalam berbagai misi pemeliharaan perdamaian. Perkembangan dunia internasional saat ini menuntut kesiapan Indonesia untuk menghadapi tantangan di bidang keamanan dan ketertiban dunia, diantaranya terjadinya *open war* maupun keikutsertaan dalam *military operations*



<sup>6</sup> Data PBB per 31 Juni 2012



other than war.

Hal-hal tersebut di atas merupakan usaha-usaha yang dilaksanakan pemerintah Indonesia dalam menjaga kepercayaan dunia tentang kemampuannya sebagai pasukan pemelihara perdamaian dunia. Namun usaha-usaha ini harus dapat mencakup usaha untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi sampai ke *ground troops level*. Secara nyata sering permasalahan-permasalahan ini hanya tertulis dibuku-buku laporan purna tugas namun seringkali tidak ditindaklanjuti secara seksama dan bahkan membutuhkan waktu yang sangat lama. Pendekatan dengan metode interview telah dilakukan dengan para pelaku sejarah yang pernah tergabung dalam Kontingen Garuda, beberapa permasalahan yang sama masih juga harus dihadapi oleh pasukan pengganti dan bahkan membutuhkan waktu bertahun-tahun.

Usaha-usaha secara politik telah dilaksanakan oleh pemerintah dengan menyusun perundang-undangan nasional dan pembangunan *Peace Keeping Center* yang bertaraf Internasional. Akan tetapi jika tidak diimbangi dengan mutu dan profesionalitas personel *on the ground* serta Alutsista dan Alkap lainnya yang sesuai dengan standar PBB, hal ini tentunya akan memberikan hasil yang sangat kontras dan berbanding terbalik dengan usaha secara politik yang dilaksanakan *top level*.

12. Rekrutmen personel penjaga



perdamaian. Seleksi bagi personel TNI yang akan diikutkan sebagai personel Satgas TNI melalui beberapa proses seleksi yang dilaksanakan sesuai dengan permintaan PBB. Semua seleksi ditujukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas nantinya, sehingga dengan beban tugas yang diterima personel tersebut dapat menyelesaikan dengan baik.

a. Kemampuan Prajurit sebagai Personel Penjaga Perdamaian. Beberapa batalyon Infanteri pernah bertugas sebagai pasukan perdamaian PBB di berbagai negara yang sedang dilanda konflik yang dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 1.1

Yonif yang pernah bertugas sebagai *Main Body* Kontingen Garuda Dalam Misi

No	Kontingen	Negara/Misi	Tahun	Satuan
1.	Konga II	Konga/UNOC	1962	Yonif L 330
2.	Konga XII-A	Kamboja/UNTAC	1992	Yonif L 503
3.	Konga XII-B	Kamboja/UNTAC	1992	Yonif L 305
4.	Konga XII-D	Kamboja/UNTAC	1993	Yonif 303
5.	Konga XXIII-A	Lebanon/UNIFIL	2006	Brigif L 17
6.	Konga XXIII-B	Lebanon/UNIFIL	2007	Brigif L 3
7.	Konga XXIII-F	Lebanon/UNIFIL	2011	Yonif L 502



Perdamaian Dunia

Secara umum pelaksanaan tugas personel yang terlibat dalam Satgas penjaga perdamaian sudah cukup baik. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil berbagai penugasan yang telah diikuti selama ini. Tetapi seperti yang disampaikan sebelumnya masih ada beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penugasan tersebut, dan yang perlu ditingkatkan secara profesional, diantaranya sebagai berikut :

1) Keterbatasan kemampuan berbahasa Inggris. Sebagai bahasa Internasional, bahasa Inggris mutlak harus dimengerti karena segala bentuk komunikasi dan *tasking order* dalam misi PBB menggunakan Bahasa Inggris. Namun, dalam kondisi nyata dilapangan sering kemampuan ini diabaikan untuk kepentingan yang harus diakomodir selama pelaksanaan seleksi. Hal ini tentunya akan menjadi *wide cliff barrier* yang akan menghambat tercapainya mandat DKPBB. Hal ini seringkali dijadikan sebagai

kritik kepada TCC (*Troops Contributing Country*) pada saat personel yang menduduki jabatan-jabatan yang memiliki nilai penting dan strategis tidak mampu berkomunikasi Bahasa Inggris dengan baik dan lancar.

Tentunya akan sulit bagi TCC untuk memenuhi jika seluruh pasukan harus bisa menguasai kemampuan bahasa Inggris di level *intermediate* atau bahkan *advance*, namun setidaknya *the key elements* (PA dan BA) harus memiliki kemampuan *advance* dalam penugasan sebagai pasukan pemelihara perdamaian.

2) Keterbatasan penguasaan kemampuan teknologi. Media atau sarana dalam lingkungan PBB hampir seluruhnya menggunakan *basic technology oriented*, sehingga kemampuan penguasaan teknologi khususnya informasi merupakan faktor mutlak yang harus dimiliki. Penggunaan komputer, internet dan GPS adalah modal sangat penting dalam misi pemelihara perdamaian dunia dan ini masih merupakan kendala bagi para prajurit yang tergabung dalam penugasan ini. Keterbatasan SDM selama ini dikaitkan dengan jadwal latihan, kondisi rotasi penugasan dalam negeri dan tantangan kedepan dihadapkan dengan era globalisasi, merupakan tantangan yang tidak punya pilihan lain harus dijawab dan diatasi baik secara



institusi maupun perorangan.

3) Keterbatasan dalam memahami *Standard Operating Procedures* (SOP) dan *Rule of Engagement* (ROE). Dalam hal pelaksanaan tugas, setiap prajurit wajib mengetahui dan memahami bahwa setiap misi pasukan pemelihara perdamaian memiliki SOP dan ROE yang berbeda disesuaikan dengan jenis konflik dan situasi kondisi daerah atau wilayah tempat terjadinya konflik. Keterbatasan ini disebabkan terbatasnya waktu penyiapan Satgas dan komposisi personel yang membentuk Satgas berasal dari beragam satuan sehingga membutuhkan waktu dalam rangka penyamaan persepsi dan tingkat kemampuan dalam memahami secara bersama-sama sebagai unit SOP dan ROE yang akan dilaksanakan di AOR (*Area Of Responsible*).

4) Kurang pengetahuan tentang etika dan tata krama hubungan internasional antara anggota militer secara universal. Dalam hubungan kerja sama dalam lingkungan internasional dengan sesama militer anggota PBB, diperlukan pengetahuan yang cukup tentang *International manner and ethics*, karena ada beberapa hal yang mungkin sudah dianggap biasa atau normal dinegara kita namun hal tersebut tidak bisa diterima dalam lingkungan kerja Internasional. Hal ini berkaitan dengan penugasan nantinya apabila tidak dapat disiapkan/diatasi sebelumnya akan mengganggu hubungan kerja yang harmonis antara anggota pasukan

perdamaian yang sedang bertugas.

5) Keterbatasan pengetahuan tentang tugas. Banyak di antara prajurit yang baru pertama kali melaksanakan tugas sebagai personel PBB, sehingga belum memiliki gambaran jelas tentang gambaran penugasan. Hal ini berpengaruh kepada ketidakpahaman harus berbuat apa selama penugasan. Biasanya hal ini terjadi di awal penugasan dan membutuhkan waktu untuk menyesuaikan meskipun selanjutnya dapat segera menyesuaikan dengan ritme penugasan. Akan tetapi, jika penyesuaian tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan cepat dan jika terjadi sesuatu pada saat transfer of authority itu dikarenakan keterbatasan kita tentang tugas dan tanggung jawab tentunya akan membawa nama buruk tidak hanya bagi TNI tapi juga pemerintah Indonesia, karena setiap prajurit yang bertugas sebagai pemelihara perdamaian adalah duta bangsa Indonesia di PBB.

b. Mekanisme seleksi personel di PMPP. Persyaratan menjadi personel penjaga perdamaian sangat menentukan dalam keberhasilan tugas nantinya. Sehingga perlu diketahui dan dipahami persyaratan apa saja yang menjadi standar tes/uji untuk bisa terpilih menjadi anggota pasukan perdamaian dunia PBB tersebut.

<sup>7</sup> PMPP TNI, *TNI dan Misi Pemeliharaan Perdamaian; Peran PMPP TNI dalam Menyiapkan Kontingen Garuda*. Percetakan Abadi, 2011.

<sup>8</sup> Ibid.



Perserikatan Bangsa-bangsa secara umum memang tidak pernah mengeluarkan standar baku mengenai rekrutmen personel militer yang akan mengembangkan misi pemeliharaan perdamaian, sehingga masing-masing TCC (*Troop Contributing Country*) diberikan kebebasan dalam menentukan proses perekutan tersebut.<sup>7</sup> Dalam proses penyiapan penyelenggaraan operasi perdamaian dunia, TNI masih mengacu pada Peraturan Panglima TNI No. Perpang/80/XII/2009, tanggal 1 Desember 2009. Walaupun tidak ada suatu standar baku secara kuantitatif dari PBB, TNI menentukan persyaratan calon anggota kontingen sebagai berikut<sup>8</sup>:

- 1) Lulus kesehatan fisik dan kesehatan jiwa.
- 2) Memiliki kemampuan berbahasa Inggris sesuai dengan level Pangkat/jabatan serta jenis penugasan perorangan.
- 3) Lulus tes kesegaran jasmani sesuai standar TNI.
- 4) Mahir mengemudi kendaraan bagi pengemudi dan personel tugas Perorangan.
- 5) Mampu mengoperasikan computer.



Untuk mendukung pelaksanaan tugas, standar kelulusan dari masing-masing materi seleksi adalah sesuai dengan standar kelulusan prajurit TNI. Hanya pada materi seleksi Bahasa Inggris disesuaikan dengan kepangkatan dan macam penugasan yaitu:

- 1) Standar kelulusan dasar (*elementary*) bagi Bintara dan Tamtama Satgas secara umum, dan *intermediate* bagi Bintara yang memegang jabatan yang berkaitan langsung dengan satuan tetangga atau komando atas.
- 2) Standar kelulusan *intermediate* untuk perwira Satgas.
- 3) Standar kelulusan *advance* untuk Komandan satuan tugas, penugasan sebagai *Military Observer/Milobs*, dan *Military Staff*.

*Sedangkan materi seleksi yang bersifat khusus disusun berdasarkan pada persyaratan dan kualifikasi jabatan atau posisi yang dibutuhkan dalam penugasan sesuai dengan MOU antara PBB dengan pemerintah Indonesia.*

13. Kesiapan Alutsista dan Alkap dalam Pelaksanaan Tugas. Pemeriksaan yang dikenal dengan COE (*Contingent Owned Equipment*) ini dilakukan setiap tiga bulan sekali, oleh tim dari PBB terhadap Negara-negara penyumbang pasukan di PBB atau TCC (*Troops Contributing Countries*) yang menggunakan sistem *wet lease* seperti Indonesia, COE merupakan kegiatan yang harus dipersiapkan, karena apabila ada salah satu peralatan yang dinyatakan tidak siap pakai maka akan berpengaruh terhadap



*reimbursement* (pembayaran kembali). Hal-hal yang diperiksa oleh tim PBB meliputi : Ranpur, Ranri, Ransus, senjata, perlengkapan perorangan, Alkom dan optik serta perlengkapan kemarkasan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok.

Selain itu tim PBB akan memberikan penilaian apakah Satgas dinyatakan siap atau tidak untuk melaksanakan operasi penjaga perdamaian di Lebanon Selatan di bawah UNIFIL. Standar kelayakan yang ditetapkan oleh PBB adalah 75% Alutsista dan material Satgas harus memenuhi syarat dan siap operasi. Jika dalam pemeriksaan tersebut kondisi alutsista dan material Satgas dibawah 75%, maka dapat dinyatakan tidak siap operasi dan dapat direpatriasi atau dipulangkan ke negara asal.

Konsekuensi yang harus dipertanggung jawabkan oleh Satgas dalam menjaga nama baik TNI dan pemerintah Indonesia, tentunya Satgas akan menggunakan segala upaya untuk memenuhi standar minimal PBB 75% dalam kesiapan Alutsista dan materiil. Beberapa kendala yang sering dihadapi Satgas berdasarkan laporan purna tugas Konga yang bertugas di Lebanon Selatan, antara lain :

- a. Tidak tersedianya suku cadang yang sesuai dengan kebutuhan. Untuk Ranpur, Ranri dan Ransus sehingga personel dari corp peralatan terpaksa memodifikasi dalam perbaikan agar kendaraan-kendaraan tersebut tetap operasional karena tuntutan tugas. Hal ini tentunya memiliki konsekuensi bahwa kesiapan operasional tersebut tidak dapat bertahan lama dan terkadang dapat

menyebabkan kerusakan pada bagian lainnya karena memang bukan suku cadang asli yang digunakan. Hal ini, yang sering mendorong Satgas untuk melaksanakan hal-hal yang seharusnya tidak patut dilaksanakan khususnya di lingkungan kerja Internasional karena akan merusak nama baik TNI dan pemerintah Indonesia. Mengatur jadwal pemeriksaan dan jadwal patroli dengan menyembunyikan Ranpur dan Ranri yang tidak layak dan memenuhi standar PBB di *static-static point* dan menukarnya dengan yang siap operasi pada saat pemeriksaan.

Hal yang paling kritis tentang kondisi kelangkaan suku cadang adalah pada saat *contingency plan* yang dapat terjadi setiap saat dan tanpa diduga-duga sebelumnya. Satgas akan sulit melaksanakan evakuasi seluruh personel, senjata dan materiil-materiil penting lainnya karena kondisi transportasi baik Ranpur dan Ranri tidak dapat digunakan untuk jelajah jauh menuju ke *collection point and save area* yang telah ditentukan. Hal ini tentunya akan membahayakan keselamatan jiwa prajurit dihadapkan kondisi *chaos* yang tidak bisa dihindari lagi serta kerawanan perampukan





senjata oleh pihak-pihak yang sedang bertikai untuk memperkuat kedudukan mereka.

b. Tidak adanya personel yang memiliki kemampuan khusus dalam pemeliharaan/perbaikan materiil-materiil khusus yang penting untuk mendukung pelaksanaan tugas seperti contoh : *container refrigerator, networking, Air Conditioner, Water treatment*, sehingga sangat bergantung pada bantuan negara-negara lain atas dasar hubungan baik persahabatan.

c. Dukungan Alkapjat, Alkom dan Optik yang tidak memenuhi standar ketentuan PBB seperti contoh : belum memiliki *mobile communication*, sehingga masih banyak terdapat *blank spot/area* antara *mobile patrol elements* dengan *tactical operation center* dalam pengendalian setiap pergerakan pasukan di dalam AOR sehingga akan sulit dalam berkomunikasi jika insiden terjadi di *blank spot/area*. Jarak *Night Vision Google* (NVG) yang tidak memenuhi kriteria yang



<sup>9</sup> Laporan Purna tugas Satgas Konga XXIII-F/UNIFIL

telah ditetapkan PBB, kondisi kompas banyak yang rusak namun belum ada pengadaan baru, hal ini tentunya membawa pengaruh besar pada kelancaran pelaksanaan tugas pokok.

d. Kondisi Alkap perorangan yang tidak memenuhi standar seperti contoh: dukungan jaket, sepatu dan Alkap musim dingin yang tidak memenuhi standar bagi pasukan yang bertugas di 4 (empat) musim, sehingga mengakibatkan banyak prajurit sakit karena tuntutan tugas mereka harus berada di lapangan selama berjam-jam melaksanakan patrol dan *static point*. Sampai dengan saat ini kondisi *body protector, helmet* dan *goggle* pasukan Konga XXIII yang bertugas di Lebanon Selatan sudah hampir 80% dalam kondisi rusak dan tidak layak pakai, namun sampai dengan saat ini belum ada pengadaan baru meskipun telah dilaporkan ke Komando Atas pada setiap kesempatan.<sup>9</sup>

e. Tidak adanya sarana dan prasarana yang diperuntukkan untuk kesejahteraan prajurit dalam rangka menjaga moril dan motivasi prajurit, seperti *fitness center* dan *internet café* didalam *compound/ UNPOSN*. Sedangkan PBB menekankan berkali-kali bahwa pemerintah Indonesia harus memenuhi kebutuhan ini, khususnya lagi karena rotasi pasukan Indonesia dilaksanakan setiap 12 bulan.

#### 14. Periodisasi Latihan dan Pembekalan.

a. Program latihan yang dilaksanakan oleh Batalyon sebelum melaksanakan tugas harus sesuai dengan latihan yang distan-



darisasi dimulai dari latihan perorangan sampai latihan tingkat Batalyon sesuai alokasi yang ditentukan dan diprogramkan oleh Mabesad sedangkan untuk latihan non program dapat dilaksanakan pelaksanaannya disela sela waktu dengan kegiatan Pembinaan Jasmani Militer, Permildas dan menembak, adapun untuk latihan yang distandarisasikan adalah :

1) Latihan Satuan sampai Latihan Tingkat Peleton. Apabila latihan Proglatsi hanya sampai tingkat peleton maka alokasi waktu yang tersedia dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2

Alokasi Waktu Latihan Yonif Sampai Latihan Tingkat Peleton

NO	JENIS LATIHAN/KEGIATAN	ALOKASI WAKTU
1	Latihan Proglatsi	3 (2 Minggu)
	a. Latihan Perorangan/Lator	9 Minggu
	Perorangan/Lator	6 Minggu
	b. Latihan/tis Raga	6 Minggu
	c. Latihan/tis Peleton	6 Minggu
	d. Latihan/tis Kompi	3 Minggu
2	Latihan Diluar Program	(10 Minggu)
	a. Birjasmil	8 Minggu
	b. Permildas	4 Minggu
	c. Menembak/Bia Bak	8 Minggu
	Kegiatan Lain/insidentil	5 Minggu
	Jumlah	46 Minggu

Sumber : Staf Operasi Yonif Linud 328/DGH,2012.

Dari kenyataan di atas terlihat masih ada sisa waktu 6 minggu yang belum dimanfaatkan oleh satuan untuk latihan ( $52-46=6$  minggu).

2) Latihan Satuan sampai Latihan Tingkat Kompi. Apabila latihan Proglatsi hanya sampai tingkat Kompi maka alokasi waktu yang tersedia adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3

Alokasi Waktu latihan Yonif Sampai Latihan Tingkat Kompi

NO	JENIS LATIHAN/KEGIATAN	ALOKASI WAKTU
1	Latihan Proglatsi	3 (2 Minggu)
	a. Latihan Perorangan/Lator	9 Minggu
	b. Latihan/tis Raga	6 Minggu
	c. Latihan/tis Peleton	6 Minggu
	d. Latihan/tis Kompi	3 Minggu
2	Latihan Diluar Program	(10 Minggu)
	a. Birjasmil	8 Minggu
	b. Permildas	4 Minggu
	c. Menembak/Bia Bak	8 Minggu
	Kegiatan Lain/insidentil	5 Minggu
	Jumlah	46 Minggu

Sumber : Staf Operasi Yonif Linud 328/DGH,2012.

Dari kenyataan di atas terlihat masih ada sisa waktu 3 minggu yang belum dimanfaatkan oleh satuan untuk latihan ( $52-49=3$  minggu).

3) Latihan Satuan sampai Latihan Antar Kecabangan (Puncak). Apabila latihan Proglatsi hanya sampai tingkat Latihan Antar Kecabangan (Puncak) maka alokasi waktu yang tersedia dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 1.4

Alokasi Waktu latihan Yonif Sampai Latihan Antar Kecabangan (Puncak)

NO	JENIS LATIHAN/KEGIATAN	ALOKASI WAKTU
1		3
2	Latihan Pengalihan	(2 Minggu)
a.	Latihan	9 Minggu
b.	Perorangan/Lator	6 Minggu
c.	Latnis/tis Kegu	6 Minggu
d.	Latnis/tis Peleton	3 Minggu
e.	Latnis/tis Kompi	3 Minggu
f.	Latnis/tis Yonif	
3	Latihan Diluar Program	(20 Minggu)
a.	Binjasmil	8 Minggu
b.	Permildas	4 Minggu
c.	Menembak/Bin Dak	8 Minggu
d.	Regimental Train/insidental	5 Minggu
e.	Bimbingan	5 Minggu

Sumber : Staf Operasi Yonif Linud 328/DGH,2012.

Dari gambar di atas terlihat masih ada waktu 5 minggu yang dialokasikan bagi kegiatan-kegiatan insidental. Dari 5 minggu untuk kegiatan insidental/lain-lain ini dirasa terlalu lama. Alasan utama diberikan 5 minggu ini sebenarnya adalah untuk memberikan waktu cuti bagi prajurit. Sementara itu waktu cuti bagi prajurit yang telah ditetapkan adalah paling lama 14 hari (2 minggu). Sehingga masih bisa diambil 3 minggu untuk kegiatan latihan di luar program.

Tabel 1.5

Alokasi Waktu latihan Tugas Operasi Perdamaian Dunia pada Program Latihan Tingkat Batalyon

NO	JENIS LATIHAN	ALOKASI WAKTU	JALAN
1	Perorangan	3 Minggu	
a.	Latihan	2 Minggu	
b.	Latihan insidental	1 Minggu	
c.	Latihan insidental	1 Minggu	
d.	Latihan insidental	1 Minggu	
e.	Latihan insidental	1 Minggu	
f.	Latihan insidental	1 Minggu	
2	Latihan	20 Minggu	
a.	Latihan	8 Minggu	
b.	Latihan	4 Minggu	
c.	Latihan	8 Minggu	
d.	Latihan	5 Minggu	
e.	Latihan	5 Minggu	
3	Latihan	1 Minggu	
a.	Latihan insidental	1 Minggu	
b.	Latihan insidental	1 Minggu	
c.	Latihan insidental	1 Minggu	
d.	Latihan insidental	1 Minggu	
e.	Latihan insidental	1 Minggu	
f.	Latihan insidental	1 Minggu	
4	Regimental Train/Tugas Operasi Perdamaian Dunia	3 Minggu	
a.	Regimental Train/Tugas Operasi Perdamaian Dunia	3 Minggu	

Sumber : Penulis, 2012

Selain materi-materi latihan program yang diberikan, dilaksanakan juga latihan diluar program untuk mengisi kemampuan prajurit yang dirasakan sangat dibutuhkan dalam menunjang tugas yaitu kemampuan menembak, peraturan militer dasar (Permildas), dan Pembinaan Jasmani Militer (Binjasmil) maka sisa waktu latihan yang ada dapat dimanfaatkan dengan menyelenggarakan pelatihan diluar program dengan materi pendukung tugas pasukan perdamaian dunia. Materi-materi yang dapat dimasukkan sebagai materi latihan di luar program tentunya adalah materi-materi yang nantinya berguna untuk mendukung pelaksanaan tugas prajurit sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB. Dengan melihat kelemahan-kelemahan



yang masih ditemukan dalam penugasan dan disesuaikan dengan materi pelatihan yang dikeluarkan oleh UNDPKO atau mengacu kepada *Specialized Training Material* (STM) untuk pasukan perdamaian<sup>10</sup> yang disesuaikan dengan kemampuan satuan menyelenggarakan latihan, ketersediaan tenaga pelatih/instruktur, tingkat pengetahuan dan keterampilan prajurit di satuan terhadap tugas misi perdamaian dunia, maka materi-materi tersebut dapat diambilkan dari daftar materi<sup>11</sup> disesuaikan dengan alokasi waktu yang ada, antara lain:

- 1) Materi Pengetahuan.
  - a) Pengetahuan persenjataan, organisasi, perlengkapan dan kendaraan.
  - b) *Civil and Military Coordination*.
  - c) Aturan pelibatan (*Rule of Engagement*).
  - d) *Standard Operating Procedures* (SOP).
  - e) Bahasa Inggris Praktis.
  - f) *Sexual Exploitation and Abuse* (SEA) dan *Alert status*.
  - g) Pengetahuan umum tentang PBB.
  - h) Pengetahuan tentang komputer dan internet.
- I) Penanggulangan terhadap cuaca panas/dingin.

2) Materi Teknik.

- a) Menembak.
  - (1) Senjata Perorangan.
  - (2) Senjata Kelompok.
  - (3) Mengenal arah dan jenis tembakan dan Daya tembus senjata.
- b) Teknik penggunaan teropong malam & teropong siang.
- c) Pengetahuan ranjau.
  - (1) Pengenalan jenis-jenis ranjau.
  - (2) Teknik penandaan ranjau.
  - (3) Pengetahuan mengenai *Unexploded Ordnance* (UXO).
- d) Navigasi Darat.
  - (1) Membaca peta.
  - (2) Pengetahuan GPS.
- e) Prosedur Komunikasi.
  - (1) Pengetahuan Alkom.
  - (2) Teknik pelaporan berbahasa Inggris.
- f) Kesehatan Lapangan dan P3K.
  - (1) Prinsip-prinsip P3K.
  - (2) Kesehatan dan kebersihan pribadi.
  - (3) Kesehatan makanan.
  - (4) Kesehatan air.
  - (5) Penanggulangan terhadap cuaca panas/dingin.

<sup>10</sup> UN Peacekeeping PDT Standards, *Specialized Training Material for Military Expert on Mission*, 2009.

<sup>11</sup> Induction Training Material, UNIFIL, 2007



- (6) Penanggulangan combat stress.
- (7) Penyakit sex menular.
- g) Kerjasama Pesawat Terbang (KSPT).
- h) Teknik PAM RPU/PAM VVIP.
- I) Teknik konvoy.
- j) Teknik negosiasi.
- k) Tindakan pengamanan (*Safety Measures and Precautions*).
  - (1) Pengamanan saat perjalanan.
  - (2) Tindakan keamanan non operasional (*Nonoperational safety measures*).
    - (a) Kecelakaan lalu lintas.
    - (b) Mengatasi kebakaran.
    - (c) Pengamanan senjata.
- l) Pelatihan khusus (*Specialized Training Areas*).
  - (1) Mengemudi (untuk para pengemudi).
  - (2) *Staff training* (Prosedur pelaporan).
  - (3) EOD (*Explosive Ordnance Disposal*) training.
  - (4) Hubungan dengan media (*Media Relations*).
- 3) Materi Taktis.
  - a) Patroli.
    - (1) Patroli jalan khaki siang/malam.
    - (2) Patroli berkendaraan siang/malam.
  - b) Pos observasi dan *Check points* siang/malam.
    - (1) *Mobile checkpoint*.
    - (2) *Static checkpoint*.
  - c) *Standard Tactical Incident Report/STIR*.
  - d) MASCAL (*Massive Casualties*).
  - e) Penggunaan Kekuatan (*Use of Force*).

Dari daftar materi yang dikeluarkan oleh UNDPKO dalam rangka *induction training* tersebut di atas, maka perlu dipilih kembali materi-materi yang memang tidak dilatihkan dalam latihan program batalyon infanteri.

Untuk alokasi waktu latihan diluar program dilaksanakan dengan melihat sisa waktu latihan yang ada dalam satu tahun program di batalyon infanteri, maka didapati adanya sisa waktu :

- 1) Sampai Latihan Tingkat Peleton : 6 Minggu.
- 2) Sampai Latihan Tingkat Kompi : 3 Minggu.
- 3) Sampai Latihan Puncak : 2 Minggu (didapat dari mengurangi waktu untuk kegiatan lain-lain/insidentil dari 5 minggu menjadi 3 minggu).

Dari sisa waktu latihan tersebut dapat disimpulkan bahwa alokasi waktu latihan yang dapat dimanfaatkan untuk menyelenggarakan pelatihan diluar program materi



pendukung tugas operasi perdamaian dunia paling sedikit adalah 2 minggu dan paling banyak 6 minggu.

Adapun materi-materi yang diselenggarakan oleh Batalyon diluar program yang mendukung dalam penugasan adalah:

- 1) Materi Pengetahuan. Materi-materi ini berupa pengetahuan yang berkaitan dengan tugas seorang prajurit penjaga perdamaian dunia secara umum, termasuk organisasi perserikatan bangsa-bangsa dan satuan tugas Kontingen Garuda, terdiri dari:
  - a) Pengetahuan persenjataan, organisasi, perlengkapan dan kendaraan.
  - b) *Civil and Military Coordination*. Memperkenalkan apa saja kegiatan yang dilakukan dalam Cimic, tujuan, serta organisasi PBB yang mengatur setiap kegiatan tersebut.
  - c) Aturan pelibatan (*Rule of Engagement*). Memperkenalkan tentang aturan pelibatan yang dimiliki PBB dalam misi perdamaian.

d) *Standard Operating Procedures* (SOP). Telah ditentukan bahwa untuk setiap Misi PBB terdapat suatu prosedur standar yang harus dirumuskan dan diikuti untuk mencegah kebingungan operasional. Hal ini berlaku bagi operasi militer atau misi apapun terutama bagi PBB yang bersifat multi nasional. Prosedure standar ini sangat penting karena pengalaman yang dimiliki kontingen atau peserta berbeda-beda dan bahwa keanekaragaman prosedur antara Angkatan Bersenjata yang lebih profesional dan tradisional.

e) Bahasa Inggris Praktis. Bahasa Inggris sebagai satu bahasa pengantar utama yang digunakan dalam operasi perdamaian dunia, menjadi keharusan bagi personel TNI yang ditugaskan menguasainya baik lisan maupun tulisan. Namun untuk menguasai bahasa inggris secara maksimal janganlah hanya terpaku pada alokasi waktu yang diberikan pada latihan diluar program, tetapi harus diberikan pengertian kepada para prajurit untuk dapat mempelajari serta mempraktekkannya di sela-sela waktu luang yang ada.

f) *Sexual Exploitation And Abuse* (SEA) dan *Alert Status*. Mempelajari hal-hal apa saja yang patut dihindari oleh setiap personel penjaga perdamaian dalam



keterkaitannya pada pelecehan seksual. Status siaga/alert status, merupakan materi untuk memperkenalkan tingkatan status siaga yang lazim digunakan oleh PBB serta tindakan-tindakan apa yang menjadi kewajiban dalam setiap tingkatan siaga.

- g) Pengetahuan umum tentang PBB. Mempelajari sejarah umum terbentuknya PBB, organisasi, serta misi yang diemban oleh PBB di seluruh dunia.
- h) Pengetahuan tentang komputer dan internet. Mempelajari bagaimana mengoperasikan komputer beserta perangkatnya paling tidak bagaimana mengoperasikan aplikasi *office* seperti *MS Words*, *Power Point*, maupun *MS Excel*.
- 2) Materi Tehnik. Lebih ditujukan kepada materi-materi teknis penunjang pelaksanaan tugas, penggunaan peralatan dan perlengkapan yang dibawa sehingga dapat digunakan secara maksimal dan profesional sebagai seorang penjaga perdamaian terdiri dari :



a) Teknik penggunaan teropong malam dan teropong siang. Memberikan pengenalan kepada para prajurit bagaimana menggunakan teropong malam maupun siang, fungsi, dan perawatannya.

b) Pengetahuan ranjau. Ini diperlukan untuk melengkapi pengetahuan para prajurit di batalyon yang akan melakukan penugasan dimana masih banyak terdapat ranjau tergelar didaerah konflik, sehingga memiliki pengetahuan dan mampu mengatasi, serta tahu apa yang harus dilakukan bila menemukan ranjau didaerah penugasan. Adapun materi-materinya berupa :

- (1) Pengetahuan jenis-jenis ranjau.
- (2) Teknik penandaan ranjau.
- (3) Pengetahuan mengenai UXO.
- (4) Prosedur Komunikasi.

Prosedur komunikasi yang digunakan dalam penugasan misi PBB sebenarnya tidak berbeda jauh dengan apa yang digunakan dalam komunikasi TNI, hanya disini menggunakan bahasa Inggris sehingga Prajurit dilatih untuk menggunakan bahasa-bahasa Inggris baku, dan lazim digunakan dalam komunikasi radio. Adapun materinya :

- (1) Pengetahuan Alkom.



- (2) Teknik pelaporan berbahasa Inggris
- c) Kesehatan Lapangan dan P3K. Pengenalan tentang P3K, kesehatan lapangan, kewaspadaan terhadap penyakit sex menular, kesehatan pribadi, makanan, air serta penanggulangan terhadap stress dalam penugasan.
- (1) Prinsip-prinsip P3K.
  - (2) Kesehatan dan kebersihan pribadi.
  - (3) Kesehatan makanan.
  - (4) Kesehatan air.
  - (5) Penanggulangan terhadap cuaca panas/dingin.
  - (6) Penanggulangan *combat stress*.
  - (7) Penyakit sex menular.
- d) Pelatihan Khusus (*Specialized Training Areas*).
- (1) Mengemudi (untuk para pengemudi). Perbedaan cara mengemudi antara negara-negara Eropa, Amerika dengan negara-negara Asia termasuk Indonesia merupakan salah satu faktor yang membuat kemampuan mengemudi stir kiri tidak dimiliki rata-rata para prajurit. Hal ini disebabkan karena hampir semua kendaraan roda empat di Indonesia menggunakan kemudi kanan. Oleh



sebab itu untuk melaksanakan tugas dalam operasi perdamaian dunia yang menggunakan kendaraan dengan stir di bagian kiri, merupakan satu hal yang perlu disiapkan benar.

- (2) *Staff Training* (prosedur pelaporan). Memberikan pelatihan bagaimana membuat laporan (*situation report/sitrep*) harian, mingguan dan bulanan.
- (3) EOD (*Explosive Ordnance Disposal*) training. Difokuskan pada pengenalan apa itu EOD, jenisnya, bahaya yang ditimbulkan dan bagaimana menghindarinya, serta apa yang harus dilakukan apabila menemukannya.
- (4) Hubungan dengan media (*Media Relations*). Memberikan pengetahuan kepada para prajurit bagaimana harusnya berhubungan dengan media, apa yang boleh disampaikan dan



apa yang tidak boleh disampaikan dalam kapasitas jabatannya.

3) Materi Taktis. Diarahkan pada pengenalan tindakan-tindakan taktis yang harus dilakukan jika terjadi suatu perkembangan situasi, seperti pelintasan batas/*technical fence*, pelemparan batu, kontak tembak antar pihak-pihak yang berkait dan sebagainya. Karena tuntutannya seorang penjaga perdamaian harus bersikap imparisial/netral serta mampu mengemban tugas yang diamanatkan kepadanya diantaranya *Standard Tactical Incident Report/STIR*, MASCAL (*Massive Casualties*) dan Penggunaan Kekuatan (*Use of Force*).

Materi pengetahuan, teknis, dan taktis yang diberikan hendaknya dapat membawa dan merubah *mindset/pola pikir* prajurit dari seorang *fighter* menjadi *peacekeeper*, karena dalam pelaksanaan tugas sebagai seorang prajurit penjaga perdamaian dunia diperlukan adanya suatu *mindset/pola pikir* sebagai seorang *peacekeeper* bukan *fighter*. Hal ini akan terlihat pada pelaksanaan tes kesehatan jiwa, sehingga perlu adanya penekanan dan pembentukan pola pikir prajurit oleh Komandan untuk merubah parameter berpikir dari seorang *fighter* menjadi seorang penjaga perdamaian sehingga pada saat mengikuti seleksi dapat memenuhi standar yang diinginkan.

Dari daftar materi pengetahuan dan keterampilan di atas maka dapat dibuat

Rangka Pokok Latihan (RPL) sehingga latihan diluar program materi operasi perdamaian dapat dilaksanakan secara lebih terencana, efektif, efisien dan mengena pada sasaran yang diharapkan.

Tabel 1.6

Rangka pokok Latihan (RPL) Diluar Program Materi Operasi Perdamaian

STIR	MATERI LATIHAN	JUMLAH	JUMLAH LATIHAN			R
			TWRI	1	2	
1	Materi Pragardine	(20)	(24)	5	3	7
	1) Perseleksi dan Standar Organisasi, pendidikan dan kaderan	4	2			
	2) Civil and Military Coordination	4	2			
	3) Armament Precaution (ARP)	3	2			
	4) Standard Operating Procedure (SOP) Prang	6	3			
	5) Religious Tolerance Praktis	2	2			
	6) Strategic Evolution from Annex UNPK to Annex Strategic Annex	2	2			
	7) Pengembangan dan peningkatan PMPP	8	2	5		
	8) Penerapan dan peningkatan standar operasi berasar Materi Pragardine	(20)	14	17	5	
2	1) Teknik evakuasi dan penanganan korban	5	4	2	3	
	2) Pengobatan dan rawat	3	1	2		
	3) Evakuasi Kesehatan	5	2	3		
	4) Kesiapsiagaan Pengobatan dan rawat	3	1	2		
	5) Pada saat Evakuasi	4	2	2		
3	Materi Taktis	(30)	(36)	(32)		
	1) STIR	10	9	8		
	2) Jurnal (Materi Operasi)	9	5	7		
	3) Pengembangan Kekuatan	5	2	3		
	<b>Jumlah</b>	60	47	33	1	

Sumber : Penulis 2012

b. Latihan Pra Tugas saat tergabung di PMPP. Setelah melalui proses perekrutan, prajurit dan satuan yang memenuhi persyaratan sesuai prosedur seleksi akan menjalani latihan terpusat yang diselenggarakan di PMPP. Latihan terpusat



PDT akan dilaksanakan selama 30 hari. Adapun tujuan dari Penyiapan Latihan ini adalah untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan personel Satgas meliputi : materi pengantar, materi CPTM, materi teknis serta materi pendukung pelaksanaan tugas Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB sesuai standar yang diharapkan.

Beberapa materi yang akan di berikan selama latihan (Satgas FHQSU KONGA/UNIFIL, FPC KONGA/UNIFIL, MCOU KONGA/UNIFIL, CIMIC KONGA/UNIFIL, dan *Level 2 Hospital* KONGA/UNIFIL) diantaranya:

- 1) Materi Pengantar.
  - a) Pembekalan Asops Panglima TNI.
  - b) Pembekalan Dan PMPP TNI.
  - c) Pembekalan Dir B Bais TNI.
  - d) Pembekalan Mantan Dan Satgas Yonmek/MPU UNIFIL.
  - e) Pembekalan Dispsi/Stress Management.
  - f) Pembekalan Kementerian Parawisata & Kreatif.
- 2) Materi Pokok/CPTM.
  - a) *Introduction to United Nations Peacekeeping.*
  - b) *Fundamental Principles of United Nations Peacekeeping.*
  - c) *The Establishment and Operationalization of Security Council Mandates for Peacekeeping Operations.*
  - d) *How United Nations Peacekeeping Operations Function.*
  - e) *International Legal Standards and the Peacekeeping Role in Protecting.*
  - f) *Human Rights, Civilians, Women and Children.*
  - g) *Working with Mission Partners.*
  - h) *HIV/AIDS and UN Peacekeeping Operations.*
  - I) *Respect for Diversity.*
  - j) *Conduct and Discipline.*
- 3) Materi Standar Umum/SGTM.
  - a) *Introduction to United Nations Peace Operations.*
  - b) *Structure of United Nations Peace Operations.*
  - c) *Legal Framework of United Nations Peace Operations.*
  - d) *Stress Management.*
  - e) *Code of Conduct.*
  - f) *Cultural Awareness.*
  - g) *Child Protection.*
  - h) *Prevention of Sexual Exploitation and Abuse.*
  - I) *Personal Security Awareness.*
  - j) *Landmine and Unexploded Ordnance Awareness.*
  - k) *Human Rights in Peacekeeping.*
  - l) *Humanitarian Assistance.*
  - m) *United Nations Civil–Military Coordination.*



- n) *Communication and Negotiation.*
  - o) *Disarmament, Demobilization and Reintegration.*
  - p) *Media Relations.*
  - q) *Uniformed Personnel in Peacekeeping.*
  - r) *Logistics in Peacekeeping.*
  - s) HIV/AIDS.
  - t) *Basic Life Support.*
  - u) *Personal Hygiene.*
  - v) *Gender Equality in Peacekeeping.*
- 4) Materi Tehnis (*Vehicle Patrol, Foot patrol, Staticpoints, OP, Counter Rocket Launching Operation, Fixed Guard dan Searches, Escort and convoy, Standardized Tactical Incident Reaction (STIR) , Background of Conflict (Lebanon) , Background of Conflict (Dafur), Mandate in UNIFIL, ROE & SOP UNIFIL dan lain-lain*).
- 5) Materi Pendukung (*Contingency Planning, Communication Procedure in UNIFIL, Contingent Own Equipment (COE), UN/Military Terminology & Symbol, Personal in Peacekeeping, Logistic in Peacekeeping, Media Relation, Humanitarian Assistance, Protection of Civilian Overview and ILD of POC, Concept of Operation POC in PKO, Culture Awareness, Pengetahuan Landmines, UXO dan IED, Pengetahuan Kesehatan, Menembak pistol, dan lain-lain*).
- 6) Materi Aplikasi (*Observation Post, Fix Guard/ Main Gate, Static Point, (Foot patrol and vehicle patrol), Escort a convoy, Crowd Riot Control (CRC), Quick Reaction Team (QRT), STIR, CIMIC, ROE & SOP UNIFIL, COE, Contingency Planning, Media Relation, dll*).
- Selain materi-materi teknis diatas juga ada materi teknis lain yang disesuaikan dengan kebutuhan tugas operasi pemeliharaan perdamaian, adapun materi tekniknya adalah sebagai berikut :
- 1) Materi Teknik Satgas MTF.
    - a) MIO/Anti Surface Warfare.
    - b) AAW.
    - c) RMP/RAP.
    - d) Maritime Air Operation.
    - e) Oporder.
    - f) Opgen/Opstak.
    - g) ROE and SOP.
    - h) Force Protection.
    - I) Boarding Party.





- j) SAR.
- k) Survival at Sea.
- l) *Communication Procedure*  
*Background of Conflict and*  
UNIFIL.
- m) *Resolution.*
- n) Pengetahuan Kesehatan.
  - (1) Penyakit HIV, AIDS dan Malaria.
  - (2) *Basic Life Support.*
  - (3) *Personal Hygiene.*
- o) *Casualty Evacuation*  
(Casevac)/*Medical Evacuation*  
(Medevac).
- p) *Hailing.*
- q) *Asymmetric Warfare.*
- r) *Helly T/O Sandar dan Lego.*
- s) RAS.
- t) *Contingency Planning.*
- u) *Reporting.*
- v) COE.
- w) *Damage Control.*
- x) Gunex.
- y) *Helly Pattern.*
- z) EMU.
  - aa) Vertrep.
  - bb) Peran-Peran
- 2) Materi Teknik Satgas MPU.
  - a) *Escort.*
  - b) *Patrolling Military Police.*
    - (1) Penegakan Aturan dan Disiplin.
  - (2) Pengaturan Lalin.
  - c) *Check Point.*
  - d) *Observation Post.*
  - e) *Fixed Guard.*
  - f) *Communication Procedure.*
  - g) *Background of Conflict and*  
UNIFIL *Resolution.*
  - h) Pengetahuan Kesehatan.
    - (1) Penyakit HIV, AIDS dan Malaria.
    - (2) *Basic Life Support.*
    - (3) *Personal Hygiene.*
  - I) *Casualty Evacuation*  
(Casevac)/*Medical Evacuation*  
(Medevac).
  - j) *Map Reading, GPS And NVG.*
  - k) ROE and SOP UNIFIL.
  - l) *UN Military Terminology and*  
*Symbol.*
  - m) *Land Mine and UXO.*
  - n) *Contingency Planning.*
  - o) *Reporting.*
  - p) COE.
  - q) *Travelling and Movement.*
  - r) *Investigation.*
    - (1) Kejadian Non Kriminal & Dugaan Kriminal.
    - (2) Pengumpulan Data dan Rik
    - (3) Kecelakaan Lalin dan Berkas.
  - s) Menembak.



- t) Pam Kegiatan & Latihan.
  - u) Pengetahuan Almatsus MP
  - 3) Materi Teknik Satgas FPC.
    - a) Pam VIP/VVIP.
    - b) *Escort*.
    - c) *Riot Control*.
    - d) *Patrolling*.
    - e) *Check Point*.
    - f) *Observation Post*.
    - g) *Fixed Guard*.
    - h) *Force Protection*.
  - I) STIR (*Standardized Tactical Incident Reaction*).
  - j) *Communication Procedure*.
  - k) *Background of Conflict and UNIFIL Resolution*.
  - l) Pengetahuan Kesehatan.
    - (1) Penyakit HIV, AIDS Dan Malaria.
    - (2) *Basic Life Support*.
    - (3) *Personal Hygiene*.
  - m) *Casualty Evacuation* (*Casevac*)/*Medical Evacuation* (*Medevac*).
  - n) *Map Reading*, GPS and NVG.
  - o) ROE and SOP UNIFIL.
  - p) *UN Military Terminology And Symbol*.
  - q) *Land Mine and UXO*.
  - r) *Contingency Planning*.
  - s) *Reporting*.
  - t) COE.
  - u) *Travelling and Movement*.
  - v) Menembak.
  - w) Pengetahuan Ranpur.
- 4) Materi Teknik Satgas YONMEK.
    - a) Pam VIP/VVIP.
    - b) *Escort*.
    - c) *Road Block*.
    - d) *Riot Control*.
    - e) *Patrolling*.
    - f) *Check Point*.
    - g) *Observation Post*.
    - h) *Fixed Guard*.
    - i) *Searches and Cordon STIR* (*Standardized Tactical Incident Reaction*).
    - j) UN CIMIC.
    - k) *Communication Procedure Background Of Conflict and UNIFIL Resolution*.
    - l) Pengetahuan Kesehatan.
      - (1) Penyakit HIV, AIDS dan Malaria.
      - (2) *Basic Life Support*.
      - (3) *Personal Hygiene*.
    - m) *Casualty Evacuation* (*Casevac*) / *Medical Evacuation* (*Medevac*).
    - n) *Map Reading*, GPS and NVG.
    - o) ROE and SOP UNIFIL.
    - p) *UN Military Terminology*



*Terminology and Symbol.*

- q) *LandMine and UXO.*
  - r) *Contingency Planning.*
  - s) *Reporting.*
  - t) *COE.*
  - u) *Travelling and Movement.*
  - v) Menembak.
  - w) Pengetahuan Ranpur.
- 5) Materi Teknik Satgas KIZI.
- a) *Patrolling.*
  - b) *Escort.*
  - c) *RoadBlock..*
  - d) *Riot Control.*
  - e) *Observation Post.*
  - f) *Fixed Guard.*
  - g) UN CIMIC.
  - h) *Communication Procedure.*
  - I) *Background of Conflict and Resolution.*
  - j) Pengetahuan Kesehatan.
    - (1) Penyakit HIV, AIDS dan Malaria.
    - (2) *Basic Life Support.*
  - (3) *Personal Hygiene.*
  - k) *Casualty Evacuation* (Casevac) / *Medical Evacuation* (Medevac).
  - l) *Map Reading, GPS and NVG.*
  - m) ROE and SOP.
  - n) UN *Military Terminology and Symbol.*
  - o) *LandMine and UXO.*
  - p) *Contingency Planning.*
  - q) *Reporting.*
  - r) *COE.*
  - s) *Travelling and Movement.*
  - t) Menembak.
  - u) RAB.
  - v) Kontruksi Bangunan.
  - w) Kontruksi Jalan.
  - x) Perbekalan Listrik.
  - y) Perbekalan Air.
  - z) *Babby Traps & Ranjau.*
  - aa) Disposal.
  - bb) Peng Alberzi.
  - cc) Ilmu Ukur.





## BAB IV ANALISA

15. Umum. Prestasi yang telah dicapai oleh Kontingen Garuda dalam melaksanakan tugasnya dalam menjaga perdamaian dunia memang telah diakui oleh dunia internasional. Hal ini tidak lepas dari jati diri prajurit TNI yaitu sebagai tentara rakyat dan tentara pejuang, dimana para prajurit sejak awal pendidikan pembentukan telah ditanamkan untuk selalu melindungi dan mengayomi masyarakat. Pasukan penjaga perdamaian, selain mencegah kembali terjadinya konflik bersenjata juga tidak lepas dari melindungi dan membantu masyarakat yang menjadi korban dari konflik tersebut.

Selain melaksanakan kegiatan patroli, *static point*, *check point* dan kegiatan operasional lainnya, kegiatan yang tidak kalah penting dalam setiap misi menjaga perdamaian adalah CIMIC (*Civil Military Coordination*). CIMIC adalah salah satu fungsi militer yang menghubungkan unsur Komandan dengan masyarakat sipil dalam rangka untuk menjalin hubungan dan kerja sama yang baik dengan pihak sipil di wilayah yang sedang mengalami konflik dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok. Kegiatan CIMIC tidak lain merupakan salah satu dari 5 fungsi organik TNI, yaitu fungsi teritorial. Keunggulan dalam pembinaan territorial inilah yang akhirnya membuat Kontingen Garuda dapat diterima dengan baik oleh masyarakat untuk saling bekerja sama menjalankan mandat PBB. Aplikasi jati diri TNI, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI telah membuat



Kontingen Garuda dapat di terima dimana saja pada saat mengemban tugas suci dan mulia seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, "ikut serta secara aktif menjaga ketertiban dan perdamian dunia".

Mempertahankan bentuk pengakuan dunia internasional atas kinerja KONGA mutlak diperlukan demi nama baik TNI dan pemerintahan Indonesia, hal ini tentu saja harus diimbangi dengan kesiapan operasional pasukan baik secara SDM, Alutsista dan materiil lainnya. Kendala-kendala yang dijelaskan di atas harus segera dianalisa dan diatasi dengan segera untuk menjaga kredibilitas Kontingen Garuda dalam menjalankan mandat PBB.

16. Rekrutmen personel. Seleksi yang telah dilaksanakan oleh PMPP (Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian) mulai dari tingkat satuan sampai dengan tingkat pusat, merupakan langkah yang tepat dalam rangka menjamin kesiapan SDM para prajurit yang akan melaksanakan tugas sebagai Pasukan Pemeliharaan Perdamaian. Materi-materi yang diujikan saat tes diantaranya kesehatan umum, kesehatan jiwa, kesegaran jasmani,



mengemudi, pengetahuan komputer dan bahasa inggris sebenarnya telah cukup untuk mendapatkan prajurit-prajurit yang siap dalam melaksanakan suatu misi operasi penjaga perdamaian dengan baik. Akan tetapi, seringkali karena suatu kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan sementara dari beberapa pihak membuat pelaksanaan seleksi ini tidak berjalan dengan baik dan menghasilkan *output* sesuai yang diharapkan.

Sampai dengan saat ini saja, kita ambil contoh struktur organisasi Satgas Yonmek TNI Konga XXIII yang dikirim ke Lebanon Selatan, sejak pengiriman I (XXIII-A tahun 2006) sd pengiriman VII (XXIII-G, tahun 2012) selalu berubah meskipun memang ada yang sudah tetap. Akan tetapi sebagai satu kesatuan utuh tentunya komposisi struktur organisasi akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam efisiensi dan efektifitas kinerja Satgas yang akan melaksanakan tugas di Lebanon Selatan. Belum adanya protap atau Bujuk yang mengatur ketetapan struktur organisasi Satgas Yonmek TNI ini memberikan peluang untuk membuat suatu jabatan baru yang terkesan mengada-ada guna mendukung beberapa kepentingan dan kebijakan sementara yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu. Bahkan untuk menyesuaikan alokasi jumlah personel Perwira, Bintara dan Tamtama yang telah ditentukan dan kemampuan personel yang terbatas akhirnya meniadakan jabatan yang sebenarnya penting untuk mengalokasikan jabatan yang sebenarnya kurang diperlukan di wilayah operasi. Kita ambil contoh yang terjadi pada Satgas Yonmek TNI Konga XXIII-F/UNIFIL, beberapa jabatan yang dijadikan saat itu di

level Perwira diantaranya *Fuel Officer, Food Officer, Military Transport Officer, Engineer Officer* dan *Force Protection Officer*. Contoh lain yang terjadi di level Bintara dan Tamtama adalah penempatan personel yang tidak memiliki kualifikasi dan pengalaman yang cukup dalam jabatan-jabatan tersebut seperti: Ba Mortir, Ba Montir dan bahkan pernah terjadi jabatan pengemudi Ranpur dan Ranri dimana personel yang terpilih tersebut kurang dari 1 bulan belajar untuk mengemudi, sedangkan dalam pelaksanaan tugas Yon Mekanis peran pengemudi sangat mutlak tidak hanya untuk mendukung pelaksanaan patroli namun juga untuk keselamatan prajurit.

Faktor-faktor tersebut diatas menyebabkan Satgas yang seharusnya sudah fokus dalam menjalankan tugas mandat PBB dengan baik, efektif, efisien dan profesional akhirnya terkendala dengan mereorganisasi struktur yang telah ada disesuaikan dengan kebutuhan di wilayah operasi. Selain itu personel-personel yang sudah tergabung dalam Satgas, akhirnya memiliki beberapa kendala secara internal seperti minimnya kemampuan bahasa inggris, penguasaan IT dan penguasaan tugas serta tanggung jawab dikarenakan proses seleksi yang tidak obyektif.

17. Materi. Dalam rangka penguasaan tugas dan tanggung jawab maka setiap prajurit yang akan melaksanakan misi operasi pemeliharaan perdamaian harus melaksanakan PDT (*Predeployment Training*) kurang lebih selama 30 hari yang diselenggarakan oleh PMPP sebelum berangkat ke wilayah operasi. Pada saat PDT inilah para prajurit berlatih baik kegiatan operasional dan administrasi



berdasarkan ROE dan SOP yang berlaku sesuai dengan misi yang akan dilaksanakan. Namun secara umum terdapat teknik, taktik dan prosedur yang sama di semua misi operasi penjaga perdamaian yang dapat dilatihkan kepada prajurit. Hal-hal spesifik yang berkaitan dengan jenis tugas dan wilayah operasi tempat terjadinya konflik harus secara rinci dipahami oleh setiap prajurit yang akan berangkat sebagai bekal dasar pelaksanaan tugas di negara yang akan dituju.

Dalam proses pembekalan materi kepada para prajurit dihadapkan dengan keterbatasan pelatih, waktu dan tempat seringkali pemberian materi khususnya pengiriman dalam bentuk pasukan (Satgas) tidak dipisahkan sesuai dengan tingkatan dan tuntutan tugas yang akan

dilaksanakan. Sebagai contoh pembekalan tentang prosedur komunikasi pada level atas masih diajarkan kepada prajurit yang bertugas di lapangan dan tidak mungkin melaksanakan tindakan tersebut, pembekalan materi khusus lanjutan terhadap personel yang tidak memiliki dasar pengetahuan tersebut (prajurit yang berkecakapan infanteri menjabat dalam tim EOD) sehingga dengan waktu yang singkat sulit untuk mencapai penguasaan materi seperti yang diharapkan. Selain itu pembekalan materi yang diberikan secara menyeluruh kepada seluruh personel yang akan melaksanakan penugasan tanpa adanya pemisahan jabatan dihadapkan dengan terbatasnya waktu latihan sehingga terlalu banyak materi diterima oleh prajurit yang sebenarnya bukan menjadi tugas





pokoknya (pejabat adminlog tetap mengikuti pembekalan patroli, CIMIC, dll). Hal ini tentunya tidak efektif dan prajurit hanya secara dangkal memahami materi yang seharusnya menguasai secara mendalam materi tentang tugas dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan di medan operasi.

18. Sarana dan prasarana. Situasi dan kondisi alat perlengkapan yang dimiliki oleh Satgas KONGA di daerah penugasan saat ini telah jauh dari standar operasional yang diwajibkan oleh PBB. Sebagai contoh pada Kontingen Garuda yang bertugas di UNIFIL apabila diruntut kembali ke awal penugasan terhitung sudah 7 tahun sejak tahun 2006 hingga saat ini Indonesia selalu berpartisipasi sebagai TCC. Berdasarkan laporan purna tugas masing-masing Satgas dan keterangan dari para

pejabat *key elements* yang bertugas saat itu, kendala yang dihadapi hampir secara umum sama berkaitan dukungan sarana dan prasarana yang selalu terlambat, tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan dan bahkan sampai Satgas Yon Mekanis Konga XXIII-F/UNIFIL hal tersebut belum terdukung.

Seperti yang disampaikan pada bab sebelumnya mengenai kesiapan Alutsista, Alkap dan materiil Satgas yang secara nyata dilapangan sering tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan PBB, namun karena rasa tanggung jawab dan kewajiban menjaga nama baik TNI dan pemerintah Indonesia, Satgas melaksanakan segala macam upaya meskipun itu terkadang tidak patut dilaksanakan untuk menunjukkan bahwa semuanya itu telah sesuai dengan standar PBB. Hal nyata yang terjadi di



Satgas Konga XXIII UNIFIL adalah sarana *container refrigerator*, dimana yang seharusnya Satgas memiliki minimal 7 unit yang harus operasional untuk menyimpan makanan, namun kenyataan di lapangan hanya 3 unit yang operasional sehingga sulit untuk menjaga makanan tidak cepat busuk khususnya pada musim panas. Kekurangan inipun sudah berjalan hampir 3 tahun terakhir dan untuk sedikit memperlambat proses pembusukan makanan, prajurit menempatkan dukungan bahan makanan segar tersebut diruang *corrime* yang dilengkapi dengan AC yang seharusnya untuk akomodasi prajurit. Hal ini disebabkan karena tidak adanya tenaga ahli yang mengerti tentang pemeliharaan dan perbaikan alat tersebut dan selain itu tidak adanya dukungan suku cadang untuk *container refrigerator* jika terjadi kerusakan.

*Container Refrigerator* adalah salah satu contoh yang terjadi saat ini, sarana dan prasarana lain yang tidak kalah pentingnya khususnya bagi Satgas Yon Mekanis adalah tersedianya *workshop* yang dilengkapi dengan peralatan perbengkelan yang memenuhi syarat untuk mendukung pemeliharaan dan perbaikan Ranpur dan Ranri yang digunakan oleh Satgas. Sampai saat ini Satgas Yon Mekanis XXIII/UNIFIL tidak memiliki *workshop* dan perlengkapan pendukungnya untuk mengatasi keterbatasan ini. Satgas menggunakan sarana *welfare* dari UNIFIL sehingga prajurit kehilangan sarana *sport hall* yang didukung dari UNIFIL untuk memenuhi kebutuhan *workshop*. Banyak perlengkapan bengkel yang belum terdukung selain suku cadang yang



terlambat dan dukungan yang tidak sesuai kebutuhan merupakan faktor-faktor yang mengakibatkan bertambahnya tingkat kerusakan Alutsista, Alkap dan materiil lainnya yang secara otomatis berakibat menurunnya kesiapan operasional Satgas secara nyata di lapangan.

Kegiatan CIMIC merupakan kegiatan pendukung yang memiliki nilai strategis dalam melaksanakan kegiatan operasional guna mencapai tujuan dari tugas pokok. Penggalangan masyarakat di wilayah konflik dalam rangka menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat dengan memenangkan hati dan pikiran masyarakat setempat sehingga mendukung Satgas dalam melaksanakan kegiatan operasional merupakan salah satu faktor penting yang harus dicapai Satgas. Kontingen Garuda selalu mampu menunjukkan keberhasilan di bidang CIMIC dan keberhasilan inipun telah mendapat pengakuan dari dunia Internasional. Meskipun demikian terdapat suatu *image* di setiap negara-negara konflik dimana Kontingen Garuda bertugas bahwa mereka tidak akan mengajukan bantuan kemanusiaan berupa materiil ke Kontingen



Garuda karena *“Indonesia has little money”*. Hal ini memang sedikit bertolak belakang dengan *image* keberhasilan di bidang CIMIC, karena kondisi nyata di lapangan bahwa tidak ada dukungan sarana penggalangan untuk Kontingen Garuda dalam melaksanakan kegiatan CIMIC yang berupa pemberian bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang menjadi korban konflik untuk mendapatkan dukungan dana sebagai sarana penggalangan kegiatan CIMIC sedangkan sebagian besar negara-negara Asia yang tergabung dalam UNIFIL seperti contoh: Korea Selatan sebesar US\$ 550.000,- dan Malaysia sebesar US\$ 150.000,-. Hal ini seharusnya mulai dipikirkan oleh PMPP Mabes TNI sebagai badan pelaksana pusat penyiapan Kontingen Garuda untuk segera diajukan ke tingkat pemerintahan. Senyum, sapa, salam, persahabatan dan keramahtamahan memang hal yang sangat penting dalam penggalangan masyarakat, namun di saat-saat kritis yang menyangkut kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat setempat dengan segera, *non-physical support* tersebut tidak mampu memberikan pengaruh signifikan dalam memenangkan hati dan pikiran masyarakat setempat di wilayah konflik

Contoh sarana dan prasarana lainnya yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok yang belum terdukung adalah yang berkaitan dengan kesejahteraan prajurit. Contoh yang diharapkan oleh PBB adanya *internet café* dan *fitness center* di dalam *compound* atau pos. Hal ini berkaitan dengan moril dan motivasi prajurit agar tetap memiliki motivasi yang tinggi dengan rutinitas tugas yang dilaksanakan selama memelihara dan menjaga perdamaian di wilayah terjadinya konflik.

Keterbatasan-keterbatasan ini seringkali terbentur oleh adanya ketersediaan anggaran dan proses birokrasi pada saat akan mendukung kebutuhan Satgas. Proses pengiriman yang cukup lama karena jarak tempuh yang sangat jauh dan biaya pengiriman yang cukup mahal. Proses birokrasi yang cukup panjang dimulai dari pengajuan satuan pelaksana sampai dengan persetujuan dari Panglima TNI membutuhkan waktu berbulan-bulan. Ditambah lagi dengan proses pengiriman dan *clearance* di negara penerima yang menyebabkan terlambatnya dukungan tersebut. Keterlambatan suku cadang akan menambah kerusakan Alutsista, Alkap dan materiil yang ada, sehingga pada saat dukungan tersebut diterima satuan pelaksana di lapangan tidak dapat mengoptimalkan perbaikan yang dilaksanakan. Kesiapan operasional Satgas secara nyata tidak akan pernah mencapai standar minimal PBB yaitu 75%. Hal ini dikarenakan kerusakan demi kerusakan akan terus terjadi dan tingkatannya pun akan bertambah karena Alutsista, Alkap dan materiil yang ada akan terus dipaksakan operasionalnya untuk memenuhi tuntutan tugas yang harus



dilaksanakan. Saat ini masih terjadi proses kanibalisasi suku cadang dari kendaraan yang ada sehingga dapat mengurangi kemampuan dari segi kuantitas peralatan Satgas. Untuk meminimalkan agar hal tersebut tidak terjadi, maka perlu Perwira staf logistik yang menguasai prosedur dan administrasi untuk mengantisipasi dukungan suku cadang tersebut sehingga dapat diterima sesuai dengan tipe yang dibutuhkan dan tepat waktu.

Hal lain yang menghambat pencapaian standar minimal PBB dalam kesiapan operasional Satgas adalah dukungan yang diterima tidak sesuai dengan pengajuan dari satuan pelaksana. Kenyataan inilah yang dihadapi Satgas dari waktu ke waktu dan ini disebabkan karena kurangnya komunikasi pihak yang melaksanakan pengadaan dengan satuan pelaksana sehingga seringkali pembelian barang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan akhirnya pada saat diterima oleh satuan pelaksana maka dukungan tersebut tidak dapat dimanfaatkan. Contoh kecil yang sering terjadi ; daya kebutuhan *accu* untuk Ranpur atau Ranri memang telah sama dengan

dukungan *accu* dari Komando Atas namun dukungan itu tidak memiliki dimensi yang dibutuhkan sehingga tidak dapat ditempatkan dirangka kendaraan yang membutuhkan pergantian *accu*. Hal tersebut hanyalah salah satu contoh kecil yang terjadi di lapangan dan masih banyak lagi hal-hal yang perlu dikomunikasikan secara detail tentang proses dukungan sarana dan prasarana sehingga tidak menyia-nyiakan baik anggaran dan waktu.

19. Periodisasi latihan dan pembekalan. Berdasarkan pengalaman yang terjadi proses penyiapan suatu Satgas dalam waktu 1 bulan menimbulkan berbagai kelemahan maupun kesulitan bagi Satgas itu sendiri untuk menjalankan tugasnya. Dengan diadakannya SBF (*Standby Battalion Force*) yang ditempatkan di markas PMPP selama satu tahun menciptakan harapan positif bagi kesiapan Satgas sebelum berangkat melaksanakan tugas di bawah bendera PBB. Dalam waktu 1 tahun itu pula kiranya perlu untuk ditetapkan suatu proglatsi yang mencakup pelaksanaan tugas sebagai pasukan Penjaga Pasukan Perdamaian PBB.





## BAB V PENUTUP

20. Kesimpulan. Tugas pokok Satgas TNI KONGA di beberapa negara yang sedang mengalami konflik secara umum dapat dilaksanakan dengan baik hal ini dapat dilihat dari tercapainya peningkatan baik kinerja maupun perawatan material, permintaan pasukan penjaga perdamaian dari DK PBB menunjukkan kinerja yang dapat dipertahankan oleh Kontingen Garuda sampai saat ini serta hubungan baik antara personel Indobatt dengan masyarakat lokal yang berada dalam wilayah penugasan (Area Operation/AO) yang terus terjaga dan terbina tanpa ada hal-hal yang bercitra negatif, meskipun terdapat beberapa hambatan, namun telah dilakukan upaya-upaya untuk mengatasinya melalui koordinasi di lapangan dengan Satuan Atas dan Samping serta melaksanakan upaya optimal dari swadaya satuan.



21. Rekomendasi. Beberapa hal yang dapat disarankan dalam rangka penyiapan Satgas KONGA agar dapat menjadi duta bangsa sebagai pasukan penjaga perdamaian dunia adalah sebagai berikut :

- a. Ditetapkannya TOP untuk Satgas TNI KONGA sesuai dengan tuntutan tugas yang telah diterima dari PBB untuk dapat melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien serta dapat dievaluasi setelah selesai tugas, sehingga setiap tahun dapat disempurnakan.
- b. Mengingat pentingnya suku cadang bagi kendaraan tempur dan kendaraan khusus untuk Yon Mekanis dan Kizi TNI KONGA dalam pelaksanaan tugas pokoknya di daerah penugasan, disarankan agar kebutuhan suku cadang Ranpur dan Ransus dapat terdukung dari Komando Atas sesuai pengajuan dan tepat waktu guna mengoptimalkan kemampuan Satgas dalam melaksanakan tugasnya.
- c. Dalam rangka meningkatkan kesiapan satuan yang akan ditugaskan dalam misi perdamaian PBB perlu dikaji tentang perlunya pengembangan materi latihan yang dipersyaratkan oleh DPKO dalam Proglatsi tingkat Batalyon.





- d. Kegiatan *CIMIC* merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting guna mendukung pencapaian tugas pokok, kegiatan ini menggunakan beberapa metoda untuk dapat mengambil simpati masyarakat lokal. Namun disarankan agar pemerintah Indonesia dapat mendukung kegiatan *CIMIC* terutama pembuatan proyek-proyek seperti yang dilakukan kontingen dari negara lain yang tergabung di *UN Mission* sebagai sarana penggalangan.
- e. Melaksanakan seleksi secara obyektif dalam rangka penyiapan personel yang akan dilibatkan dalam Satgas sehingga benar-benar didapatkan personel-personel yang profesional dibidang tugasnya masing-masing. Hal ini sangat penting mengingat tugas misi perdamaian di PBB merupakan tugas kehormatan dan berperan sebagai duta bangsa Indonesia dalam menjaga stabilitas keamanan dunia dan pencitraan TNI serta pemerintah Indonesia di dunia internasional.

Bandung, September 2013  
Komandan Seskoad

Ir. Arief Rachman, M.B.A., M.M  
Mayor Jenderal TNI





Lampiran-2

## DAFTAR PUSTAKA

1. Data dukungan “UNIFIL National project for CIMCI 2007 ” dari UNIFIL J-9/CIMIC.
2. Data PBB per 31 Juni 2012.
3. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Huala Adolf SH.LLM. PhD, Bab 5, pasal 3.
4. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Huala Adolf SH.LLM. PhD, Bab 5, pasal 3.
5. Ho-Won Jeong, 2008, *Understanding Conflict and Conflict Analysis*, London: Sage.
6. Induction Training Material, UNIFIL, 2007.
7. Kemlu RI, Partisipasi Indonesia dalam Pasukan Misi Perdamaian PBB, dapat diakses di <http://www.kemlu.go.id/Pages/IIssueDisplay.aspx?IDP=10&l=id>.
8. Temuan-temuan ini di dapat dari hasil pengamatan penugasan Batalyon Mekanis Kontingen Garuda di Unifil, Lebanon.
9. Laporan Purna tugas Satgas Konga XXIII-F/UNIFIL.
10. Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyambut Sekjen PBB Ban Ki-Moon di IPSC, Sentul, 20 Maret 2012.
11. PMPP TNI, *TNI dan Misi Pemeliharaan Perdamaian; Peran PMPP TNI dalam Menyiapkan Kontingen Garuda*. Percetakan Abadi, 2011.
12. UN Peacekeeping PDT Standards, *Specialized Training Material for Military Expert on Mission*, 2009.



**DAFTAR NAMA POKJA**  
**PENYIAPAN SATGAS TNI DALAM MISI PERDAMAIAN**  
**SEBAGAI IMPLEMENTASI UU NO. 34/2004**

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL. KORPS, NRP/NIP	JABATAN		KET
			STRUKTURAL	PENUGASAN	
1.	Zaedun, S.Sos	Kolonel Inf, 30438	Dirbinjianbang Seskoad	Narasumber	
2.	Ridwan Effendi	Kolonel Inf, 29959	Dirbindik Seskoad	Narasumber	
3.	Edy Kriswanto, S.IP	Kolonel Kav, 30075	Wadirbinjianbang Seskoad	Narasumber	
4.	Eddy Suprapto, S.H	Kolonel Arm, 31673	Kabidjianbang Juang- doktrinorg	Kapokja	
5.	Ibrahim Pulungan, S.IP	Kolonel Inf, 32278	Kabid Opsdik Sdirbindik Seskoad	Wakapolja	
6.	Hardjito, S.IP	Kolonel Arm, 31670	Kabidjianbang Ilpengtek/ Sospol Sdirbinjianbang Seskoad	Anggota	
7.	Abdul Karim	Kolonel Inf, 30785	Kabidjianbang Terjemen Sdirbinjianbang Seskoad	Anggota	
8.	Agustinus, S.IP	Kolonel Inf, 32343	Kabidjianbangdik Sdirbinjianbang Seskoad	Anggota	
9.	Rafian, S.IP, M.M.	Kolonel Czi, 32450	Kabidjianbang Straops Sdirbinjianbang Seskoad	Anggota	
10.	Ahmad Sutarmadi	Letkol Inf, 1910037630768	Dosen Madya Seskoad	Anggota	
11.	Husein Sagaf	Letkol Inf, 1910024351068	Dosen Madya Seskoad	Anggota	
12.	I Made Tirka Nurgaduh, S.IP	Letkol Czi, 1910048111169	Dosen Muda Seskoad	Anggota	
13.	Asep Nugraha	Letkol Inf, 1920025581268	Dosen Muda Seskoad	Anggota	
14.	Budhiarto	Letkol Cpl, 1920047037169	Dosen Muda Seskoad	Anggota	
15.	Rusmiyati	Letkol Cpm (K), 585143	Kabagminjianbang Sdirbinjianbang Seskoad	Anggota	
16.	Ranon Sugiman	Mayor Czi, 1930091050470	Kabagpam Sdirbinlem Seskoad	Anggota	



1	2	3	4	5	6
17.	Drs. Slamet Riyadi	Letkol Inf, 33568	Pabandya Jianbang Ilpengtek/Sospol Sdirbin-jianbang Seskoad	Anggota	
18.	Ari Estefanus, S.Sos	Mayor Arm, 11960040790474	Pabandya Jianbang Terjemen Sdirbinjianbang Seskoad	Anggota	
19.	Agus Sulistiyo	Mayor Inf, 11980044160176	Pabanda Terjemen Sdirbinjianbang Seskoad	Anggota	
20.	M. Faozan, S.Pd	Mayor Arm, 11010011290774	Pabandya Straops Sdirbinjianbang Seskoad	Anggota	
21.	Wahyuni RHS	Kapten Cku (K), 582779	Kaurminjianbag Seskoad	Anggota	
22.	Eriyus Faizar	Lettu Cba, 21940104800472	Kaurjianbang Seskoad	Anggota	
23.	Ahmad Syaikhu, S.Ag	Mayor Inf, 11980028321273	Pabanda Ilpengtek/ Sospol Sdirbinjianbang Seskoad	Sekretaris I	
24.	Ratna Yuliantuti, S.Kom	Kapten Ctp (K), 11020024560777	Pabanda Juang Doktrinorg Sdirbinjianbang Seskoad	Sekretaris II	
25.	Subagio	Serda, 31970494755077	Turmin Bagminjianbang Sdirbinjianbang Seskoad	Pendukung	
26.	Asep Cahyawan	Pengatur II/c, 197007171993121001	Operator Komputer Kabidjianbang Dik Sdirbinjianbang Seskoad	Pendukung	
27.	Sri Astutik	Pengatur II/c, 197005051992032007	Operator Komputer Kabidjianbang Juangdoktrinorg Sdirbinjianbang Seskoad	Pendukung	